

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 23-7-2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	8
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan sesuai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, dimaksud sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

TABEL 2.1
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja	Satuan IKK	Target Rendra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)			
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	7.98	8.06	8.12	8.16	9.77	11.40	10.83
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		78.24	79	80	81	78.88	83.73	80.78

3.2. Analisa hasil pengembangan Perilaku Perangkat Daerah sampaikan dengan Tabelan II Isi hal berikut:

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

NAMA BKO : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINrang JABUNG BARAT

No	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (objektif/Metrikas/indikator)	Target Pelaksanaan pada Tahun 2024 (Aksi Perilaku Rencana dan Perangkat Daerah)	Posisi Capaian Kinerja Rencana dan Pengaruh Dari/berdasarkan Rencana dan Perangkat Daerah yang diwujudkan	Rendemen Kinerja Pada Triwulan						Revisi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah adi Akhir Tahun 2025 (Waktu Tahun Pelaksanaan Fisik Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Dari Akhir Tahun 2024 (%)	Perangkat daerah yang dikenakan sanksi dan/atau diberikan penghargaan				
						1	2	3	4	5	6	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	
1	2	3	4	5	6	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	Rp.	K.	
		KEUANGAN																
		Berjalan	Jumlah Dokumen Perbaikan Masa Wajib	83,00	80,13	81,09												
		Kualitas Polutan Publik dan Aksibilitas Kredisi	Hilir AIP	70,00	78,43	69,59												
		Program Penilaian Unsur Penitahitan Daerah Kabupaten/Kota	Persebaran Perwadihan Komponen Penitahitan Layanan Kanker	100%	49,89%	9,774,502,972	4,09%	1,062,149,345	13,400,000	7,650,000	5,750,000	28.940.485.545	54,09%	24 Dokumen	21 Dokumen	41 Laporan	3 Dokumen	188 Orang/Bulan
			Jumlah Dokumen Perestraian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	23 Dokumen	116.832.000	2,71%	1,474,210,294	26.680.000	16.375.000	10.365.000	317.001.280	63,16%	1 Dokumen	5 Laporan	Dokumen	46 Orang/Bulan	
			Jumlah Dokumen Perbaikan Perangkat Daerah	38 Dokumen	32 Dokumen	184.034.500	4,09%	1,479.000.000	621.000.000	92.886.750	50.980.000	7.768.887.272	40,080.000	20 Dokumen	21 Laporan	Dokumen	46 Orang/Bulan	
			Jumlah Dokumen Perbaikan Perangkat Daerah	38 Dokumen	20 Dokumen	36 Laporan	12 Laporan	184.034.500	92.886.750	18.628.000.778	18.817.956.278	108.941.750	10.000.280.824	21.160.118.208	21.157.188.800	50,0%	47,89%	
			Kontribusi dan Pengaruh Laporan Capaian Kinerja dan Waktu Realisasi Kinerja SP2D	Jumlah Capaian Cptan Kinerja dan Waktu Realisasi Kinerja SP2D	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	44.648.000.000	41.000.000.000	339 Orang/Bulan	3 Dokumen	142 Orang/Bulan			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kewangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Daging dan Turutjalan ASK	Jumlah Daging dan Turutjalan ASK				59,4%	49,2%	
			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Satuan	Program/Inisiatif	Indikator Kinerja Program (Indikator/Kegiatan (output))	Target Rendah Peningkatan pada Tahun Tahun 2026 (Akhir Periode Kerja Pengangguran Daerah)	Realisasi Capaian Kriteria Rendah Peningkatan pada periode kerja pada akhir tahun Lalu (2023)	Rendahnya Pengangguran pada Tahun						Posisi Capaian Kriteria Ketiga dan Anggaran Pendapatan Netto Pengangguran yang ditentukan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024 (%)	Rendahnya Capaian Kriteria Ketiga dan Anggaran Pendapatan Netto Pengangguran yang ditentukan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2026 (%)	Tingkat Capaian Kriteria ketiga dan anggaran pendapatan netto pengangguran daerah yang berlakunya pada akhir tahun 2024 (%)						
						5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	Penyekretariat Komisi Trahansi Lurah/Pengawas Berpengalaman Kunci	Jumlah Pelaku Kepemimpinan Institusi Lurah/Pengawas Berpengalaman Kunci yang Didireksikan	Target Rendah Peningkatan pada periode kerja pada akhir tahun Tahun 2026 (Akhir Periode Kerja Pengangguran Daerah)	1 Paket	6 Paket	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyaluran Panganan dan Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Penyaluran dan Peningkatan Kualitas yang Didireksikan	6 Paket	30 Paket	6 Paket	2 Paket	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemasaran Bahan Logistik Kancana	Amritah Paket Bahan Logistik Kancana yang Cicakabala.	81.145.050	369.309.850	263.000.000	263.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	79.866.000	12.320.000	394.948.700	36.543.000	12 Paket	3 Paket	10.380.000	70.642.000	91.525.000	55.00%	34.38%
		Peningkatan Bantuan Cukai dan Pengabdian	Abruktif Pihak Bantuan Cukai dan Pengabdian yang Disusulan	12 Paket	15 Paket	12 Paket	3 Paket	12 Paket	12 Paket	12.320.000	12.320.000	155.681.174	21.420.000	36 Dokumen	3 Paket	10.380.000	70.642.000	438.951.850	65.67%	37.44%
		Peningkatan Bahan Baku dan Perbaikan Peningkatan Undangan	Jumlah Paket Bahan Baku Beras dan Perbaikan Peningkatan Undangan yang Disusulan	15 Paket	72 Paket	15 Paket	9 Paket	15 Paket	15 Paket	111.868.885	111.868.885	3.142.000	3.142.000	51.00%	3.142.000	2.500.000	2.500.000	267.530.000	56.36%	35.69%
		Peningkatan Pendidikan Kondisi dan Komitmen S2PG	Jumlah Liputan Peningkatan Pendidikan Kondisi dan Komitmen S2PG	72 Paket	72 Dokumen	72 Paket	36 Dokumen	72 Paket	72 Paket	1.114.280.000	1.114.280.000	1.114.280.000	1.114.280.000	41 Laporan	3 Paket	10.380.000	70.642.000	1.658.103.383	1.114.280.000	15.67%
		Pengembangan Pasar Daerah Peningkatan Uraza Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengelolaan Bantuan Milik Daerah Peningkatan Uraza Pemerintah Daerah	108%	72 Laporan	108%	36 Laporan	108%	108%	500.000.000	500.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000	0	1 Unit	11 Unit	11 Unit	449.900.000	10.0%	26.18%
		Pengembangan Kemandirian Asumsi Dinas atau Kendali dan Dinas - obat	Jumlah Unit Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan yang Disusulan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	860.000.000	860.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000	0	11 Unit	11 Unit	11 Unit	22.200.000	11.0%	2.39%
		Pengembangan Model	Jumlah Model Dikembangkan	100	100	100	100	100	100	860.000.000	860.000.000	1.720.000.000	1.720.000.000	0	11 Unit	11 Unit	11 Unit	22.200.000	11.0%	2.39%

No	Satuan	Pengembangan	Indikator Kinerja Program (Internasionalisasi (output))	Tingkat Kinerja Peningkatan Daerah Tahun 2024 (Wart Paroksi Raya Pemergiat Daerah)	Rencana Capaian Kinerja Raya Pemergiat Daerah sejauh dengan Raja Peningkatan Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran Raya berdasarkan Raja Peningkatan Daerah yang didefinisikan	Perjalanan Kinerja pada Tahun						Penilaian Cerdas Ketika dan Resiko yang mendekati Tahun 2024	Penilaian Capaian Kinerja tan Anggaran Raya Pemergiat Daerah setiap 2025 (abu Tariq Peningkatan Raya Peningkatan Daerah Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan resiko yang mendekati Tahun 2024 (%)	Unit Pengaruh dalam yang berpengaruh Jenis	
							I	II	III	IV	V	VI					
1	2	3	4	5	6	7	8	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Peningkatan Perilaku dan Hasrat Lainnya	Jumlah Unit Penilaian dan Bebas Lainnya yang Didefinisikan	Jumlah Unit Aset Yang Lainnya yang Didefinisikan	245 Unit	2.325.000.000	500.000.000	2.271.196.000									14.7 x 100%	15
	Peningkatan Rasa Tanggung Jawab	Peningkatan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	776.840.065	36 Laporan	36 Laporan	1.100.000	29.135.188	74.043.690	2.000.000	114.243.690	41 Laporan	41 Laporan	642.190.000	65 Unit	0
					328.694.800	3 Laporan	3 Laporan	900.000	44.968.502	21.735.000	94.567.000	67.943.502	3 Laporan	3 Laporan	90.000	0	0,50%
					72.055.600	12 Laporan	12 Laporan	101.100.000	1.645.096.000	188.159.798	16.465.000	46.700.188	2 Laporan	2 Laporan	2.325.000.000	2 Laporan	0
					169.580.873	3 Laporan	3 Laporan	94.567.000	199.580.873	21.844.270	125.939.077	635.869.857	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	635.869.857	50.000%
					625.825.200	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.055.600	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	0
					88.664.000	3 Laporan	3 Laporan	101.100.000	1.645.096.000	188.159.798	16.465.000	46.700.188	2 Laporan	2 Laporan	90.000	28.055.600	28.055.600
					314.011.200	12 Laporan	12 Laporan	94.567.000	199.580.873	21.844.270	125.939.077	635.869.857	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	635.869.857	50.000%
					141.469.256	45 Unit	45 Unit	16.671.000	1.683.315.499	141.469.256	141.469.256	663.196.894	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000	12 Laporan	0
					622.000.000	3 Unit	3 Unit	1.100.000	52.19.500.000	1.910.099.000	1.910.099.000	52.19.500.000	3 Unit	3 Unit	1.100.000	3 Unit	0
					262 Unit	144 Unit	144 Unit	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Environ Biol Fish (2009) 86:169–176

Environ Biol Fish (2007) 79:179–184

卷之三

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
8	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	APBD
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
15	Pengadaan Mebel	APBD
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
24	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
25	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
26	Penuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
29	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
30	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
31	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
32	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
33	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
34	Penagihan Pajak Daerah	APBD
35	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
36	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bilang Uraian Penelitian/Dasar dan Program/Kegiatan	RENCANA 2024			RENCANA PERUBAHAN 2024			Bantuan/Berkurang Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dasar Pada Indikator	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
5.02	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Peningkatan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	12.218.500.000	9.774.502.872	Peningkatan Pengembangan Kompetensi Penitjangan Pelayanan Kantor	100%	12.228.350.019
5.02.01.2.01	Perekonomian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	390.000.000	116.832.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.539.256.719
5.02.01.2.01.01	Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencairan Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	65.852.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Pencairan Perangkat Daerah	4 Dokumen	65.852.000
5.02.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khasiat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khasiat Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	175.000.000	50.980.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khasiat Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	50.980.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.390.000.000	7.708.607.272	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.298.197.659
5.02.01.2.02.01	Pengembangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	8.200.000.000	7.315.149.272	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Orang yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	6.907.839.669
5.02.01.2.02.02	Pengembangan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	1 Dokumen	450.000.000	340.520.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	1 Dokumen	340.520.000
5.02.01.2.03	Kordinasi dan Pilkada dan Akhirnya SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pilkada dan Akhirnya SKPD	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pilkada dan Akhirnya SKPD	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pilkada dan Akhirnya SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pilkada dan Akhirnya SKPD	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	-
5.02.01.2.03.07	Kordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	12 Laporan	102.020.000	56.028.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	12 Laporan	51.028.000
5.02.01.2.03.08	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	85.050.000	78.082.800	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	78.082.800
5.02.01.2.03.09	Perbaikan dan Pergantian Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	Jumlah Laporan Perbaikan dan Pergantian Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	12 Laporan	85.050.000	79.882.800	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Perbaikan dan Pergantian Laporan Keuangan Bukan/Tidak dalam Semestinya SKPD	12 Laporan	79.882.800
5.02.01.2.05	Administrasi Kepengawaihan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepengawaihan Perangkat Daerah	1 Dokumen	240.000.000	115.020.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Kepengawaihan Perangkat Daerah	1 Dokumen	110.050.000
5.02.01.2.05.02	Pengembangan Pelaksanaan Dinas Berbasis Aplikasi Kelengkapananya	Jumlah Pelaksaan Dinas berbasis Aplikasi Kelengkapananya	2 Paket	190.000.000	110.050.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengembangan Pelaksanaan Dinas berbasis Aplikasi Kelengkapananya	2 Paket	110.050.000
5.02.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelajaran Penguatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengembangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengutamakan Pendidikan dan Pelajaran	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengembangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengutamakan Pendidikan dan Pelajaran	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengembangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengutamakan Pendidikan dan Pelajaran	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	-

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bingkang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA 2024			RENCANA PERUBAHAN 2024					
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana Pendekat Pagu Indikator	DPK 2024	Lelitian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Sekelain Perubahan	Bantuan/ Bekerja
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Objek yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	50.000.000	5.000.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Objek yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	(5.000.000)	APBD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Berguna Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Umute Perangkat Daerah	12 Laporan	1.422.500.000	700.521.700	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pengelolaan Umute Perangkat Daerah	12 Laporan	1.107.357.000	309.508.500	-
5.02.01.2.06.01	Penyedian Komponen Infrastruktur/Penerangan Berguna Kantor	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	85.000.000	11.370.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Paket Komponen Infrastruktur/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	17.854.000	6.204.000	APBD
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bantalan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	305.000.000	264.117.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Paket Bantalan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	254.117.000	-	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bantalan Logistik Kantor Direktorat	Jumlah Paket Bantalan Logistik Kantor yang Direktorat	2 Paket	50.000.000	35.900.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Paket Bantalan Logistik Kantor yang Direktorat	2 Paket	35.900.000	-	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cukai dan Pengendalian Pengendalian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cukai dan Pengendalian yang Disediakan	3 Paket	265.000.000	70.668.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Paket Barang Cukai dan Pengendalian yang Disediakan	3 Paket	113.118.000	33.250.000	APBD
5.02.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Perangkat-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perangkat-Undangan	12 Dokumen	12.500.000	12.320.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perangkat-Undangan	12 Dokumen	12.320.000	-	-
5.02.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Rumah Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Perkuliahan dan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	12 Laporan	850.000.000	394.948.100	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	12 Laporan	664.290.800	255.302.100	APBD
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintah Daerah	100%	650.000.000	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintah Daerah	100%	145.728.000	140.773.300	-
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kompleks Fisik dengan Cicil atau Kewajiban Dikurangi dengan Pendekatan	Jumlah Unit Kewajiban Pengadaan Dikurangi dengan Dikurangi	-	-	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Unit Kewajiban Pengadaan Dikurangi dengan Dikurangi	-	-	-	APBD
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kompleks Dikurangi dengan Lengkap	Jumlah Unit Kandarasa Dikurangi dengan Lengkap	-	-	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Unit Kandarasa Dikurangi dengan Lengkap	6 Unit	-	-	APBD
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Melalui	Jumlah Melalui yang diberikan	20 Unit	175.000.000	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Melalui yang diberikan	100 Unit	54.148.000	64.148.000	APBD
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diberikan	20 Unit	475.000.000	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diberikan	64 Unit	86.574.000	86.574.000	APBD
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Paket Tarif Lainnya	Jumlah Unit Paket Tarif Lainnya yang Diberikan	-	-	-	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Unit Paket Tarif Lainnya yang Diberikan	-	-	-	APBD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	12 Laporan	445.000.000	378.864.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	12 Laporan	348.908.250	10.284.250	-
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	12 Laporan	20.000.000	3.250.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	12 Laporan	12.500.000	6.250.000	APBD
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diberikan	12 Laporan	345.000.000	290.937.000	BAPEDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diberikan	12 Laporan	228.071.250	{4.065.750}	APBD

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA 2024				RENCNA PERUBAHAN 2024				
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana Pengeluaran	Sekilas Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Sekilas Perubahan	Bantuan Bekerlang	Sumber Dana
5.02.01.2.05.04	Pengelolaan dan Pelaporan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Isi dan Pelaporan Urusan Kantor yang Disusulan	12 Laporan	100.000.000	94.507.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Isi dan Pelaporan Urusan Kantor yang Disusulan	12 Laporan	103.427.000	5.900.000	APBD
5.02.01.2.06	Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.000.000.000	695.855.200	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	705.225.200	80.400.000	-
5.02.01.2.03.01	Pengelolaan dan Pemantauan, Bisnis Perusahaan dan Pajak, Kondisi dan Perkembangan Bisnis atau Kesiapan Dinas Jelaskan	Jumlah Kondisi dan Perkembangan Bisnis atau Kesiapan Dinas Jelaskan yang Dipelihara dan diawasi Pengelolaan	1 Unit	125.000.000	66.054.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Kondisi dan Perkembangan Bisnis atau Kesiapan Dinas Jelaskan yang Dipelihara dan diawasi Pengelolaan	1 Unit	65.664.000	-	APBD
5.02.01.2.09.02	Pengelolaan dan Pemantauan, Bisnis Perusahaan, Pajak dan Perizinan Bisnis Operasional atau Lapangan	Jumlah Kondisi dan Perkembangan Bisnis atau Kesiapan Bisnis Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diawasi Pengelolaan	45 Unit	305.000.000	314.011.200	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Kondisi dan Perkembangan Bisnis atau Kesiapan Bisnis Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diawasi Pengelolaan	45 Unit	307.011.200	60.000.000	APBD
5.02.01.2.15.05	Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur yang dipelihara	14 Unit	6.000.000		BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Infrastruktur yang dipelihara			-	APBD
5.02.01.2.05.06	Pemeliharaan Perkembangan dan Masa Lalu	Jumlah Perkembangan dan Masa Lalu yang Dipelihara	85 Unit	350.000.000	121.980.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Perkembangan dan Masa Lalu yang Dipelihara	85 Unit	128.740.000	7.750.000	APBD
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan dan Pengelolaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Pengelolaan	3 Unit	250.000.000	101.160.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Pengelolaan	3 Unit	120.810.000	19.950.000	APBD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	6.463.000.000	2.754.846.000		Percentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	2.850.004.200	75.246.200	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.445.600.040	6.463.000.000	2.754.846.000		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111.945.600.040	6.600.004.200	75.246.200	
5.02.04.2.01.01	Penerapan dan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Resmi Pergebolehan Pajak Daerah	2 Dokumen	275.000.000	185.136.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen Resmi Pergebolehan Pajak Daerah	2 Dokumen	90.752.000	1.544.000	APBD
5.02.04.2.01.02	Analis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Perbaikan Kekalahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kekalahan Pajak Daerah	1 Dokumen	250.000.000	183.970.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kekalahan Pajak Daerah	1 Dokumen	172.570.000	8.800.000	APBD
5.02.04.2.01.03	Pengeluhan dan Penyelesaian Kasus Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Pajak Daerah dan Penyelesaian Kasus Kekalahan Pajak Daerah	10 Laporan	520.000.000	41.400.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Penyelesaian Pajak Daerah dan Penyelesaian Kasus Kekalahan Pajak Daerah	10 Laporan	42.829.200	1.423.200	APBD
5.02.04.2.01.04	Perekadaan Sosial dan Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sosial dan Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	500.000.000	35.412.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Sosial dan Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	35.812.000	1.400.000	APBD
5.02.04.2.01.05	Perekadaan dan Penitahuan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penitahuan dan Perekadaan Objek Pajak Daerah	11 Laporan	500.000.000	258.264.000	BAPENDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Hasil Penitahuan dan Perekadaan Objek Pajak Daerah	11 Laporan	265.414.000	48.150.000	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bingkai Untuk Pemeliharaan Dengan Program/Kegiatan	RENA 2024			DPA 2024			RENA PERUBAHAN 2024		
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tujuan Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dasar Pada Indikatif	Sekeluar	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tujuan Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan	Berimbang/Berkembang	Sumber Dana
5.02.04.2.01.08	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawasan Baitul Maal Pajak Daerah	4 Laporan	650.000.000	676.460.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawasan Baitul Maal Pajak Daerah	4 Laporan	478.290.000	1.400.000	APBD
5.02.04.2.01.07	Pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan Perbaikan dan Pemeliharaan (PBB/P2) serta Baitul Maal Pajak Huk. Akta, Tanah dan Bangunan (BPHHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disusulkan HJOP roye	2500 Objek Pajak	745.000.000	30.805.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Objek Pajak yang Disusulkan HJOP roye	2500 Objek Pajak	62.605.000	2.000.000	APBD
5.02.04.2.01.08	Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pajak Daerah	3 Dokumen	700.000.000	430.221.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pajak Daerah	3 Dokumen	440.006.000	9.736.000	APBD
5.02.04.2.01.09	Pelatihan dan Konseptualisasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konseptualisasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	12.976.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Layanan dan Konseptualisasi Pajak Daerah	90 Layanan	12.876.000	-	APBD
5.02.04.2.01.10	Pemeliharaan dan Verifikasi Data Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penilaian dan Verifikasi	8 Dokumen	470.000.000	214.656.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penilaian dan Verifikasi	8 Dokumen	214.656.000	-	APBD
5.02.04.2.01.11	Pengeluhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pidatamaan Pengeluhan Pajak Daerah	10 Dokumen	900.000.000	670.222.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pidatamaan Pengeluhan Pajak Daerah	10 Dokumen	579.222.000	-	APBD
5.02.04.2.01.12	Pengelolahan Kebutuhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolahan Kebutuhan Pajak Daerah	35 Dokumen	150.000.000	12.876.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolahan Kebutuhan Pajak Daerah	35 Dokumen	12.876.000	-	APBD
5.02.04.2.01.13	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan serta Pengawasan dan Pengelolaan Pajak Daerah	11 Dokumen	360.000.000	214.248.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan serta Pengelolaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	214.248.000	-	APBD
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Rantauku Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Rantauku Daerah	16 Laporan	250.000.000	143.920.000	BAPEIDA Kab. Tangerang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Rantauku Daerah	16 Laporan	146.746.000	2.844.000	APBD
J U M L A H				19.391.500.000	12.526.390.972				12.728.390.972	199.999.947	

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 23-7-2024

KEPALA BAPENDA,

